



Policy Brief

# Strategi Komunikasi Risiko dalam Konteks Inisiasi Sekolah Ramah Anak dan Implementasi Literasi Digital di Nusa Tenggara





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendekatan Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat diperlukan untuk mengakomodir serta memobilisasi akses informasi terkait isu kesehatan di lingkungan Sekolah, komunitas guna menunjang suksesnya program Sekolah Ramah Anak yang menjadi salah satu tujuan klaster pencapaian Kabupaten Layak Anak menuju tercapainya Provinsi Layak Anak (Provila) dan memaksimalkan program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) di provinsi NTB dan NTT.

Menjawab kebutuhan tersebut, PKBI daerah NTB dan NTT dengan dukungan UNICEF bermitra dengan Pemerintah, Akademisi, Komunitas/ Masyarakat, Media menggarisbawahi pentingnya memahami peta kebutuhan informasi masyarakat bersumber dari komunikator terpercaya, data akurat, penyampaian pesan yang menarik serta memanfaatkan media komunikasi yang efektif dan aksesibel.

## PENDAHULUAN

Dalam 41 tahun, jumlah populasi dunia yang mampu membaca dan menulis, naik dari angka 68% menjadi 86% pada tahun 2020. Kendati demikian, sejumlah 771 juta remaja dan orang dewasa di dunia masih belum menguasai kecakapan literasi dasar. Dimana, 60%-nya merupakan remaja Perempuan dan Wanita Dewasa. Mirisnya setelah Pandemi Covid 19, hampir 24 juta pelajar di dunia terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. (*Sumber Website UNESCO: <https://www.unesco.org/en/days/literacy>*)

Di NTB total jumlah Anak sebanyak 35,3% dari total jumlah penduduk NTB yaitu sebanyak 1.927.569 jiwa dari total Penduduk sebanyak 5.389.998 jiwa (*sumber: Data BPS dan data profile Anak tahun 2020*).

Data ini menunjukkan betapa pentingnya untuk dapat terus mendorong pemenuhan hak-hak anak yang telah tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu: UUD 1945 Pasal 8 Ayat 2, Keppres 36/1990 Konvensi Hak Anak, UU nomer 35 tahun 2014 revisi UU No 23 tahun 2002, serta Perpres no 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Indonesia.

Menurut Perpres No.25 tahun 2021 tentang KLA mendefinisikan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dukungan pelaksana KLA merujuk pada penjabaran Pasal 72 UU. 35 tahun 2014 yang menyebut Empat Pilar Pembangunan Anak yang terdiri dari Pemerintah, Masyarakat, Media, Swasta/ Dunia Usaha.

Dukungan Pemerintah dan Lintas sektor terhadap perlindungan anak meliputi Kelembagaan dan 5 klaster yang keseluruhannya terdiri dari 24 Indikator. Lima Klaster antara lain: Klaster 1. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster 2 Mencakup Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster 3, Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Klaster 4, meliputi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Klaster 5, Perlindungan Khusus.



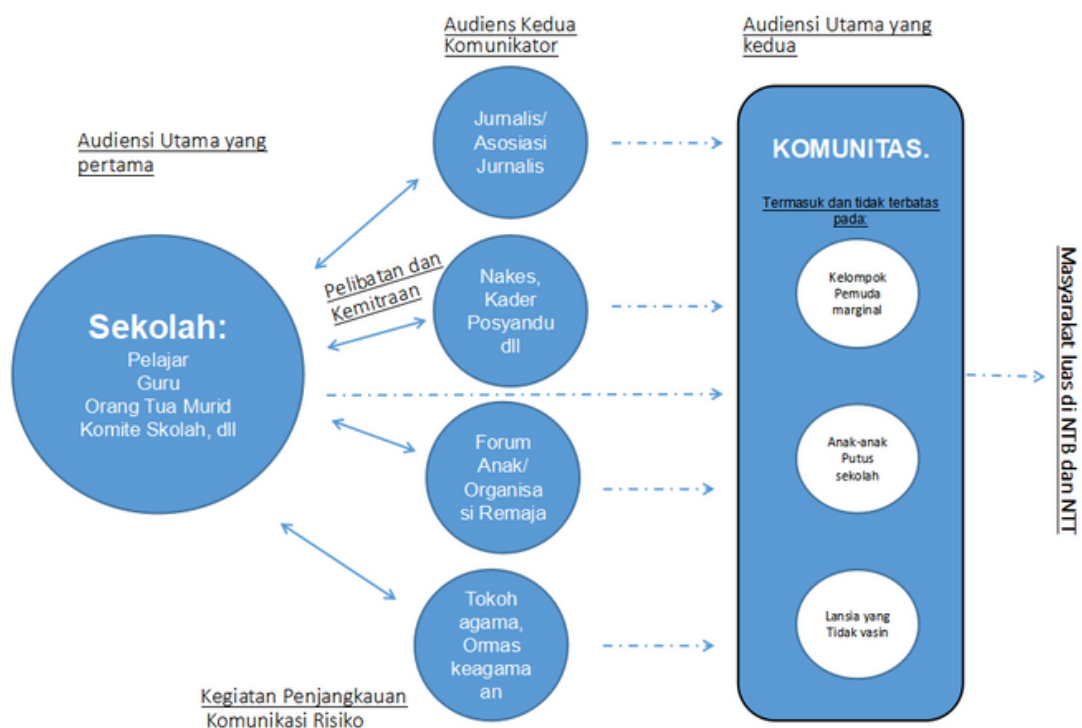


## HASIL DAN KESIMPULAN

1. Koordinasi dan Kolaborasi Para Pihak dalam bingkai program RCCE telah dilakukan dengan melibatkan aktif unsur Pemerintah, Media, Masyarakat, Akademisi dan Swasta. Pemerintah daerah yang berperan aktif dalam proses seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pendidikan, DP3AP2KB. Dari Unsur Media melibatkan Media online seperti Kicknews.com, termpo.co, serta media lokal lainnya dalam upaya penyebaran informasi, peningkatan kapasitas Jurnalis, Peliputan yang berfokus pada isu kesehatan dan pemenuhan hak-hak anak.

Peran Akademisi dalam hal ini berkontribusi pada pengetahuan, memberikan input terhadap hasil survey, analisis data, serta berperan sebagai trainer pada peningkatan kapasitas yang dilakukan sesuai bidang.

Pihak Swasta seperti CSO, Bisnis Media telah berupaya untuk kolaborasi dalam hal penyediaan sumber daya. Elemen utama yaitu Masyarakat terdiri dari komunitas, kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh remaja, pemuda, forum anak sebagai penggerak perubahan berkontribusi banyak dalam hal memobilisasi penjangkauan informasi dan pesan penting guna memerangi hoaks dan melakukan kampanye literasi digital mencakup isu kesehatan dan pemenuhan hak-hak anak.



## 2. Peningkatan Kapasitas

Diawali dengan penilaian awal terhadap pemetaan kebutuhan program komunikasi risiko dan melibatkan masyarakat yang terlaksana di lokasi intervensi yang ada di dua Provinsi. Dari penilaian tersebut, dilaksanakan Pelatihan TOT KAP dan SBC (Komunikasi Antar Pribadi dan Perubahan Perilaku Sosial) yang melibatkan sebanyak 62 orang pelatih provinsi di NTB dan NTT terdiri dari unsur Pemerintah, Media, Akademisi, Masyarakat, CSO, Swasta.

Tindak lanjut dari TOT tersebut yaitu mobilisasi serta diadakannya Kegiatan Pelatihan bagi Agen Perubahan dan Komunikator terlatih di sekolah dari berbagai latar belakang profesi seperti Guru, Tenaga Kesehatan di Puskesmas, Kader Posyandu, Anggota forum Anak, Kelompok Remaja, Jurnalis.

Total sejumlah 355 orang Komunikator terlatih yang tersebar di 177 sekolah yang ada di dua Provinsi. Serta sejumlah 609 orang Kader Mitra/relawan terlatih yang tersebar di 81 Komunitas yang ada di antaranya 38 komunitas 7 Kabupaten/kota lokasi intervensi di NTB dan 43 Komunitas di 6 Kabupaten/Kota lokasi intervensi di Provinsi NTT.

Pelatihan bagi Jurnalis perwakilan Media telah dilakukan dengan melibatkan sekitar 56 orang Jurnalis dan 18 Media Massa online dan Offline di dua provinsi. Pelatihan yang dilakukan ditindak lanjuti dengan pengajuan proposal Penyaluran hibah peliputan yang fokus pada isu kesehatan di lokasi program.

### 3. Mobilisasi Komunitas

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang kesehatan keluarga, PKBI NTB bekerjasama dengan UNICEF telah berupaya mendukung program GNLD pemerintah melalui program literasi digital yang berfokus pada isu-isu kesehatan.

Komunikasi perubahan perilaku merupakan sebuah proses interaktif antar individu dan komunitas yang paling sesuai untuk membangun perilaku positif terkait etika digital dan keamanan digital sesuai konteks lokal. Tanpa adanya perubahan perilaku dari masyarakat, maka percepatan peningkatan literasi digital masyarakat akan sulit dilakukan. Komunikasi perubahan perilaku menyediakan lingkungan pendukung yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berinisiatif, mempraktikkan, dan mempertahankan perilaku positif yang diharapkan.

Adapun capaian jumlah anggota komunitas Sekolah yang dilibatkan oleh Komunikator dalam rentang satu tahun program sebanyak 35.012 orang. Dan total keseluruhan mencakup penjangkauan oleh kader terlatih, relawan dan Komunikator baik secara online dan offline yaitu berjumlah kurang lebih 124.885 orang dengan aktifitas mobilisasi penjangkauan yang beragam seperti kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstra dan intra kurikuler, kegiatan Posyandu, penyuluhan, aktifitas keagamaan, dorum diskusi komunitas serta penyebaran informasi melalui media massa online dan media sosial Facebook, Instagram, Youtube, WA Group dan lainnya dengan total sekitar 1024 aktifitas pendukung.



### 4. Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pembelajaran

Proses monitoring dan evaluasi dalam konteks inisiasi SRA di sekolah-sekolah yang tersebar di Kabupaten/Kota yaitu dengan bersama Dinas terkait seperti Dikbud Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi bersama ke sekolah sasaran seperti SMA, SMK dan di tingkat kabupaten bersama Dinas Pendidikan menysasar ke sekolah seperti SMP dan SD sederajat.

Pelibatan Tenaga Kesehatan (Nakes) dalam hal penjangkauan informasi kepada masyarakat serta mengukur efektifitasnya baik melalui aktifitas Posyandu dengan pelibatan Kader dan kelompok sasaran.

Kesimpulan:

Kontribusi PKBI daerah NTB dan NTT dengan Pelaksanaan Program telah berupaya mempermaksimkuat Kelembagaan KLA serta bergerak untuk memenuhi Indikator khususnya pada Klaster 4, mengenai Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dengan memperkuat Indikator 19 yaitu Satuan Pendidikan Ramah Ramah Anak melalui inisiasi dan Pelibatan Sekolah Ramah Anak yang tersebar di wilayah/ lokasi Program.



## REKOMENDASI

Dari hasil evaluasi akhir program yang dilaksanakan pada minggu ke-IV Mei 2023 dengan mengundang seluruh elemen yang terlibat selama ini, dihasilkan poin rekomendasi guna penguatan dan pengimplementasian Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat khususnya dalam mewujudkan KLA dan GNLD antara lain:

### 1. Memperkuat Pokja Literasi Digital di Daerah

Pemerintah Daerah dalam hal ini Diskominfo bersama Mitra CSO, Akademisi, Mafindo, Masyarakat, dan pelibatan Jurnalis Media dipandang perlu untuk terus meningkatkan gerakan literasi digital khususnya di daerah guna mencegah penyebaran berita hoaks dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang beredar.

2. Optimalisasi peran PKK dan CSO yang lebih luas dalam implementasi program KLA dan sinergi program Lingkaran Remaja-PKBI sebagai upaya memperkuat pola praktek perlindungan anak di masyarakat.

3. Meningkatkan Kolaborasi program lintas sektor dan CSO dalam upaya pencapaian target sasaran imunisasi, vaksinasi di daerah. Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan sumberdaya untuk melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat.

4. Pendokumentasian hasil pembelajaran yang dapat menjadi panduan untuk tiap program khususnya Program Imunisasi yang lebih efektif di masa depan.

5. Menyusun Indikator dan sistem pengukuran, evaluasi program secara sistematis sehingga target, capaian dan dampak program dapat terukur secara berkesinambungan. Evaluasi penelitian secara berkala untuk memantau perkembangan capaian program dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

6. Mengoptimalkan penggunaan media online, media sosial sebagai sarana sosialisasi, edukasi sebagai salah satu upaya penguatan Literasi Digital dan memerangi hoax yang beredar di masyarakat.



**Pelaksana Program RCCE Nusa Tenggara:**

Penanggung Jawab : Direktur PKBI NTB- Ahmad Hidayat

Manager Program : Nurul Azizah

Manager Keuangan : Santika Agustin

Monitoring, Evaluasi, Learning : Afria Budiman

**Koordinator Wilayah NTB : Ardani**

District Organizer Kota Bima: Ni'mah Nahariyah

District Organizer Kab. Bima: Nurhasnawati

District Organizer Kab. Dompu: Zainal Arifin

District Organizer Kab. Sumbawa: Rahmad Ramdani

District Organizer Kab. Sumbawa Barat: Latifah

District Organizer Kab. Lombok Timur : Agus Khairi

District Organizer Kota Mataram : Roby hariyanto gunawan

**Koordinator Wilayah NTT: Reno Raines Saingo**

District Organizer Kab. Malaka: Uncianus Natalius Teti Nahak

District Organizer Kab. Kupang: Bertinus V. D. Teti

District Organizer Kab. TTU: Libertus Nino

District Organizer Kab. TTS: Yandri Edison Mantolas

District Organizer Kab. Belu: Anna Alfriyanty Otemusu

District Organizer Kota Kupang: Adrianus Wio

**Media Online Campaign:**

- PKBI Daerah NTB
- Pkbi Ntt



- PKBI Daerah NTB
- Pkbi Ntt



- PKBI NTB
- Forum Remaja PKBI NTT

**Alamat Kantor PKBI daerah NTB:**

Jl. Majapahit No. 11 A, Mataram 83121

Telp (0370) 7844163, Fax (0370) 643727,

Hotline Klinik (0370) 7844163/ HP.087-862-260-905,

Hotline Youth Center (0370) 7844163/HP.085-338-040-676

Email: pkbintb@pkbi.or.id

**Alamat Kantor PKBI daerah NTT:**

Jl. Basuki Rachmat No. 2, Naikolan, Maulafa, Kupang 85117

Telp (0380) 822270, Fax (0380) 822270, Hotline Youth

Center 081-246-344-290, Email: pkbintt@pkbi.or.id